

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Negara yang Dilanda Konflik: Studi Kasus di Negara Thailand

Fahmi Anwar Nasution¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, fahmi.anwar2nasution@gmail.com

Abstrak. Thailand terdiri dari dua bagian dengan berbeda agama, suku, daerah dan budaya. Sebelah utara yang dikenal sebagai Kerajaan Thailand, dan sebelah selatan kebanyakan seorang Muslim yang beriman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam Thailand. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan, berupa artikel dan buku dan dokumen lainnya. Hasil penelitian adalah kebijakan pendidikan di Thailand dipengaruhi dengan situasi politik yang ada pada saat itu. Situasi Politik Thailand Pada tahun 1930-an, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan. Sistem monton tidak ada lagi. Monthon Pattani dibagi menjadi tiga negara bagian: Pattani, Yarra dan Narathiwat. Setiap Muang (provinsi) menjadi Changwat (provinsi) dan diawasi langsung oleh pemerintah pusat Bangkok. Kebijakan dan Sistem Pendidikan Islam Thailand; a) Sistem Surau dan Masjid; b) Sistem Pondok Tradisional; c) Sistem Madrasah; d) Sistem Taman Kanak-Kanak dan e) Sistem Pondok Pesantren Modern. Dampak Politik terhadap Pembangunan Pendidikan Thailand, manajemen sistem pendidikan berada di bawah satu atap: kepemimpinan, manajemen, tenaga kependidikan, kurikulum.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam

Abstract. Thailand consists of two parts with different religions, ethnicities, regions and cultures. The north is known as the Kingdom of Thailand, and the south is mostly a devout Muslim. The aim of this research is to analyze Thailand's Islamic education policy. The method used is a qualitative approach, while the data collection technique is by means of articles and books and other documents. The result of the research is that education policy in Thailand was influenced by the political situation that existed at that time. Thailand's Political Situation In the 1930's, there was a change in the government system. The montane system no longer exists. Monthon Pattani is divided into three states: Pattani, Yarra and Narathiwat. Each Muang (province) becomes a Changwat (province) and is directly supervised by the central government of Bangkok. Thai Islamic Education Policy and System; a) Surau and Mosque systems; b) Traditional Pondok System; c) Madrasa system; d) Kindergarten System and e) Modern Islamic Boarding School System. The Impact of Politics on Education Development In Thailand, the management of the education system is under one roof: leadership, management, teaching staff, curriculum.

Keywords: Policy, Islamic Education

PENDAHULUAN

Penyebaran pendidikan Islam tradisional di Asia Tenggara tidak dapat diketahui secara pasti, demikian pula di

Patani (Thailand Selatan), namun ada beberapa catatan sejarah yang menurut Ahmad Umar, “pendidikan pesantren tradisional di Patanii dimulai Islam di

tanah Patanii dan masyarakat Patani berkembang kemudian selama 300 tahun sebelum Raja Patanii Sultan Ismail Syah memeluk Islam (1488-1511)"(Amin & Ananda, 2019). Ketika raja masuk Islam, begitu pula anggota keluarga dan pejabat istana memeluk Islam, sejak saat itu Islam mulai terbentuk secara berkembang di Patanii dan memproklamasikan kedaulatan Kerajaan Darusalam Patani kepada Islam Melayu (Ridwan, 2014).

Lebih lanjut Ahmad Umar menjelaskan: "Pendidikan di masyarakat muslim diawali dengan belajar Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an ini dilakukan di Mushola (Balai Syah), masjid dan rumah-rumah. Guru disebut "Tok Guru Al-Qur'an" terdapat di setiap desa Patanii. Pendidikan Al-Qur'an mendorong pendidikan dalam bentuk pondok Sejak saat itu didirikan pondok di Patanii yang menjadi lembaga pendidikan penting dan sangat berpengaruh dan menjadi pusat masyarakat, pondok dipandang sebagai pelindung budaya Melayu dan agama Islam Peran dan pengaruh hawan dalam masyarakat sangat besar

Pada masa Patanii, negara Islam Malaya, peradaban Islam mencapai puncak kemajuan, kekayaan, dan kemewahan. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama karena pemerintah Thailand iri dengan kemakmuran Patani pada abad ke-17 dan awal abad ke-18. Menambah sakit hati pemerintah Thailand adalah direbutnya Ayuttaya (bekas ibu kota Thailand) oleh bangsa Melayu Patani pada tahun 1563. Thailand berkali-kali menyerang Patani dan akhirnya berhasil, sehingga kedaulatan kerajaan Melayu Patani jatuh ke tangan Thailand pada tahun 1563 1785. pengembangan pendidikan Islam di Patani melalui sistem pondok (Abdulmani, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang meliputi telaah

dokumen. Dalam istilah Creswell (2013) mendefenisikan penelitian ini disebut sebagai pencarian studi kepustakaan dengan mereview jurnal, buku, laporan penelitian, dan literatur lain yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini Penulis melakukannya. Pertama, melakukan penelusuran literatur yang sesuai dengan materi yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Negara Thailand

Thailand awalnya dikaitkan dengan Kerajaan Sukhothai yang berumur pendek, yang berdiri pada tahun 1238. Setelah runtuhnya kerajaan itu, digantikan oleh Dinasti Ayutthaya (abad ke-14). Kerajaan mengalami sistem jaya karena kawasan itu merupakan jalur perdagangan negara-negara Eropa (Sodiqin, 2016). Kerajaan Pattani tinggal di selatan Kerajaan Siam. Kerajaan Pattani atau Langkasuka muncul dari orang-orang Melayu Malaka yang meninggalkan kabupaten tersebut pada saat terjadi gejolak politik di negeri sendiri di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Sistem perdagangan luar biasa yang dimiliki orang Arab, India, Muslim Cina, dan Muslim lainnya milik Melayu Patanii untuk berdagang dan berdakwah kepada orang Patanii yang akhirnya masuk Islam, dan Islam di Thailand Dampaknya menjadi lebih terasa daripada Raja Islam Sya Islam Juga, pada abad ke-16 mendirikan kerajaan Islam pertama di Thailand, empat raja wanita, yaitu Ratu Hijau (15481616 M) dan Ratu Biru (16161624). M), Ratu Ungu (16241635 M) dan Ratu Kunin (16351651 M), 12 dan Raja Manusia yaitu Slyman selama beberapa periode di bawah bimbingan Sultan Musaffer (Karim & Asyari, 2016).

2. Situasi Politik Thailand

Pada tahun 1930-an, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan. Sistem monton tidak ada lagi. Monthon Pattani dibagi menjadi tiga negara bagian: Pattani, Yarra dan Narathiwat (Ridwan, 2014). Setiap Muang (provinsi) menjadi Changwat (provinsi) dan diawasi langsung oleh pemerintah pusat Bangkok. Pemerintah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pridi Banomyong, telah memperkenalkan sistem baru ke dalam pemerintahannya. Setiap negara bagian memiliki perwakilan Di Thailand selatan, perwakilan Muslim selalu dipilih oleh Dewan Legislatif Siam (Kusuma, 2016).

Pada tahun 1938, Jenderal Thailand Phibun Songkhram memutuskan kepemimpinan Kerajaan Thailand. Kebijakan kontroversial Phibun termasuk pengenalan kebijakan Rasnyom (Revolusi Budaya) yang bertujuan menciptakan identitas budaya Thailand yang progresif (Fathurahman, 2014). Kebijakan "siamkam" non-Thailand (kebijakan Siamisasi) seperti Melayu dan Cina. Dengan kebijakan ini, orang Melayu dan Tionghoa mengubah nama aslinya menjadi nama Thailand dan sekarang hanya berkomunikasi dalam bahasa Thailand (Harahap & Rajab, 2022). Hal yang sama terjadi dengan sistem regulasi baru Thailand. Perkembangan situasi politik di Malaya tahun 1950-an sangat berbeda dengan tahun 1930-an dan 1940-an (Amin & Ananda, 2019).

Dari tahun 1930-an hingga 1940-an, orang Melayu dan Melayu Inggris menyatakan simpati dan kepeduliannya terhadap perjuangan Melayu Patanii. Namun, dari akhir 1940-an hingga awal 1950-an, pembentukan Federasi Malaya dan ancaman komunis berhasil menarik perhatian pada urusan dalam negeri Melayu. Akibatnya, dukungan masyarakat Melayu terhadap isu Patanii

mulai berkurang. Selain itu, karena takut dengan gerakan komunis, Inggris mulai bekerja dengan monarki Thailand untuk menghancurkan organisasi kiri ini. Alhasil, organisasi GEMPAR dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Inggris pada November 1948 (Bustamam-Ahmad, 2015).

Perkembangan tahun 1990-an merupakan masa untuk memperlambat hubungan dan keamanan antara Bangkok dan Thailand selatan. Politik kerajaan demokrasi Thailand yang sedang berkuasa mencoba pendekatan baru dalam program inklusinya setelah lama menerapkan sistem eksklusif. Peran orang Melayu dalam politik nasional Thailand mulai membaik pada 1990-an (Berutu, 2019). Ada banyak umat Islam yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan Thailand saat itu, seperti Wakil Menteri Luar Negeri Surin Pisswan, kemudian Menteri Luar Negeri Wang Muhammad Nor Mata yang menjadi ketua Parlemen Thailand, dan Den Tomina, putranya. Kelihatannya (Sodiqin, 2016). Mantan Wakil Menteri Dalam Negeri Haji Slon. Upaya demokratisasi yang agresif dari akhir 1980-an hingga 1990-an telah memungkinkan terciptanya stabilitas politik. Meningkatnya keterlibatan dalam proses penyusunan Konstitusi Thailand terbaru pada tahun 1997 menunjukkan upaya pemerintah Thailand untuk melibatkan orang Melayu dalam proses politik negara itu (Abdulmani, 2014).

Krisis ekonomi 1997 menempatkan Thailand dalam lingkungan ekonomi dan politik yang tidak stabil. Hal ini diikuti oleh serangan WTC 9/11, yang memiliki implikasi serius bagi krisis politik global dan perdamaian regional. Masalahnya diperparah ketika lebih dari 300 senjata dicuri di Kompleks Tentara Choiron Narathiwat dan rakyat

serta pemerintah Thailand dikejutkan oleh masalah keamanan nasional (Karim & Asyari, 2016). Empat anggota Komando Operasi Keamanan Thailand tewas dalam insiden ini. Insiden tersebut membuat wilayah selatan menjadi waspada dan mendapat perhatian khusus dari Bangkok, negara-negara tetangga dan masyarakat internasional. Situasi ini diperparah dengan penembakan di Masjid Krisk (Krue Se) pada April 2004, menewaskan 107 orang. Kemudian, pada 25 Oktober 2004, peristiwa Tak Bai menewaskan lebih dari 100 orang Melayu Thailand dari wilayah selatan (Kusuma, 2016).

3. Kebijakan dan Sistem Pendidikan Islam Thailand

a. Sistem Surau dan Masjid

Dari kemunculan Islam oleh mubaligh asing dan mubaligh lokal di Patani, awal penyebaran dan pengajaran Islam (Amin & Ananda, 2019), mereka menggunakan ruang surau atau masjid untuk menciptakan visi keagamaan dan memperkuat komunitas Patani melalui pendidikan Islam. Upaya yang dilakukan adalah melalui sistem pendidikan tersebut adalah Syekh Daud bin Abdullah al-Fathan. tempat menyebarkan agama Islam dengan mempelajari berbagai pengetahuan, seperti belajar ilmu al qur'an, fiqh, barzanj (Yuniarto, 2005). Sampai saat ini nilai-nilai religi telah diajarkan kepada anak-anak masyarakat muslim Patanii melalui pendidikan berbasis masjid atau surau. Selain itu masjid juga dijadikan tempat belajar dan membaca Al-Qur'an, serta belajar kitab al-Barzanji, mengembangkan ilmu fikih, dll (Nordholt, 2014).

Masyarakat muslim Patani menjadikan Masjid atau surau

sebagai tempat sentral atau pusat kegiatan keagamaan Islam, baik untuk ibadah maupun untuk kegiatan keagamaan Islam seperti maul, yasinan, pendidikan, membaca buku. Barzanji dan sebagainya (Bustamam-Ahmad, 2015). Kadang-kadang juga digunakan sebagai pusat kegiatan sosial seperti khitanan massal (Berutu, 2019). Maka berdasarkan praktik moderat para pengurus/takmir masjid ini, lambat laun menghilangkan kecurigaan banyak pihak bahwa masjid Patani merupakan tempat berkembang biaknya pandangan ekstrimis (Aslan, 2019).

Lembaga pendidikan berbasis masjid dan surau menggunakan sistem konvensional di memberikan kontribusi terhadap perkembangan pesantren yang ada di Pattani. Dimana masjid dan surau tersebut masih di temukan di berbagai tempat ibadah ustadz dan santrinya belajar mengaji tentang agama lain di sore hari dan pulang setelah sholat Isya, sistem ini dikenal dengan TPA/TPQ di Indonesia (Nasrullah Djamil, Khairunnas Rajab, 2021).

b. Sistem Pondok Tradisional

Secara antropologis dan fungsional, gubuk adat Patani tidak berbeda jauh dengan rumah-rumah nusantara pada umumnya, dimana keberadaannya tentu saja untuk menjaga identitas dan eksistensi keagamaan (Bustamam-Ahmad, 2015). Hal ini tentu saja sejalan dengan pandangan Michael Gilquin bahwa pondok tradisional ini memiliki peran penting dalam pembelajaran Islam di Asia Tenggara pada umumnya (Abdulmani, 2014). Ditinjau dari segi fungsional, pondok adat muslim ini digunakan sebagai tempat

melaksanakan tata cara talaqq (membaca kitab bagi masyarakat melayu langsung di depan “Tok Guru” atau dalam istilah yang biasa digunakan di Nusantara, kyai) (Harahap & Rajab, 2022).

Maka para guru yang mengajar ilmu agama di pondok pesantren tradisional lebih mengutamakan kemampuan santrinya dalam membaca kitab-kitab. Sein itu guru juga memiliki tanggung jawab untu menjadikan santrinya memiliki akhlak dan adab (Berutu, 2019).

Pesantren tradisional seperti ini sangat sulit ditemukan di Thailand sekarang, karena semua pesantren tradisional yang hanya mempelajari agama dan administrasi nya masih bersifat klasik dalam artian belum mengenal sistem administrasi atau kurikulum, sudah pindah ke yang modern. pesantren (Abdulmani, 2014).

c. Sistem Madrasah

Madrasah Patani-Thailand Selatan mengadopsi sistem yang di terapkan di Indonesia, dengan tujuan menumbuhkan minat masyarakat, dalam pengembangan ilmu agama dan ilmu umum lainnya (Bustamam-Ahmad, 2015). Sistem madrasan indonesia dan madrasah di Patani dan Nusantara memiliki perbedaan. Perbedaan mendasar adalah pengelolaan dan kepemilikannya. Di Nusantara, sebagian madrasah dikelola dan dikelola negara, dan sebagian lagi milik yayasan/swasta dan yayasan (Berutu, 2019).

Madrasah di Patani dikelola pribadi maupun kelompok (swasta). Keterlibatan negara lebih merupakan fungsi pengawasan dan pengendalian sistem pendidikan Islam di Patani. Namun apabila lembaga pendidikan madrasah

menerapkan sistem pendidikan diluar yang tetapkan pemerintah, pemerintah atau kerajaan melakukan tindakan tegas dengan penutupan madrasah (Bustamam-Ahmad, 2015).

Kehadiran sistem pendidikan Islam berbasis madrasah di Patani berasal dari modernisasi pendidikan Islam. Minangkabau era 1900-1930 yang memperkenalkan sistem pendidikan Islam menggabungkan kelas, bangku dan pengetahuan umum lainnya (Karim & Asyari, 2016).

Pendidikan madrasah ini memberikan sistem penjenangan secara jelas yaitu tiga jenjang yaitu ibtidayah/tingkat SD (6 tahun), mutawisshith/tingkat umum (3 tahun) dan tsanawiiyyah, tingkat SMA/ sederajat (3 tahun), tingkat spesialis, ilmu agama(Sawaluddin, Koiy Sahbudin Harahap, Imran Rido, 2022), gabungan ilmu umum, penguatan budaya melayu dan latihan baris-berbaris dan sebagainya, maka dengan lahirnya madrasah ini secara tidak langsung melahirkan sistem cinta agama, kebangsaan dan tanah air komunitas Muslim Pattan (Melayu).

d. Sistem Taman Kanak-Kanak

Penidikan taman kanak-kanak lahir pada tahun 1950-an dari tuntutan negara bekas Kerajaan Thailand yang secara khusus mewajibkan anak-anak Melayu Patani dan bersekolah dengan pihak Kerajaan dari Thailand. (Harahap & Rajab, 2022).

Seiring dengan perkembangan yang ada, sekolah taman kanak-terus melakukan permbenahan tanpa menghilangkan ciri khasnya membesarkan anak-anak Patani dalam semangat kepribadian budaya

Melayu (Harahap & Rajab, 2022). upaya untuk membawa kembali Muslim Thailand (Nasrullah Djamil, Khairunnas Rajab, 2021).

Selain itu, persoalan bahasa melayu selalu menjadi perbincangan hangat di Thailand, sehingga jika identitas melayu ini tidak dilestarikan setidaknya melalui bahasa melayu, maka menurut orang Patani tentunya tidak ada yang menjamin keberadaan orang Melayu di Thailand di masa depan (Fathurahman, 2014).

e. Sistem Pondok Pesantren Modern

Kebijakan pemerintah atau kerajaan Thailand dibidang pendidikan Islam adalah melakukan transformasi melalui Pusat Pendidikan Menengah Regional di Provinsi Ya'la. Salah satu Faktornya adalah keinginan pemerintah Thailand agar semua lembaga pendidikan yang berada di bawah perlindungan pemerintah Thailand didaftarkan dan diatur dengan sistem dan peraturan tersebut (Amin & Ananda, 2019).

Secara historis, proses peralihan ke pesantren (sekolah Islam swasta) tidak lepas dari tarik ulur antara masyarakat Patani dan pemerintah Thailand (Bustamam-Ahmad, 2015), yaitu sebaliknya, pada dasarnya kaum Patani hanya ingin mengubah pendidikan Islam dengan model pendidikan yang tetap mengikuti tradisi Melayu, keinginan untuk memperkenalkan sistem pendidikan yang modern, namun tetap dalam koridor Islam dan budaya Melayu, bahwa dalam rangka bernegara bagi bangsa Patani, negara harus menjamin kebebasan dan tidak mencampuri secara langsung sistem pendidikan Patani dan lingkungannya, seperti

menghilangkan jati diri bangsa Melayu atau mata pelajaran Pendidikan agama Islam (Berutu, 2019).

Pendidikan Islam melalui pesantren modern dibagi menjadi beberapa jenjang, mulai dari jenjang Ibtidaiyyah (sekolah dasar), jenjang Mutawasshithah (sekolah menengah pertama), dan jenjang Tsanawiyyah (sekolah menengah atas)(Karim & Asyari, 2016). Selain itu, pemerintah Thailand dalam pelaksanaan bidangnya juga menyelenggarakan waktu belajar atau studi akademik bagi mahasiswa Muslim Patanii tingkat ibtidaiyyah yang dilaksanakan 4 tahun (8 semester), mutaw washitah 3 tahun (6 semester) dan tsanawiyyah tahun ketiga (6 semester) (Sodiqin, 2016).

4. Dampak Politik terhadap Pembangunan Pendidikan Thailand

Dampak kemenangan Thailand terhadap perebutan kembali Pattani yang mengincar Thailand untuk memenangkan perang. Patanii ingin merebut kembali wilayahnya meminta bantuan dari Inggris, tetapi gagal karena Inggris mendukung bekerja dengan orang Thailand. Petani yang menjadi bagian dari Thailand semuanya mengalami perubahan dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan (Kusuma, 2016). Upaya masyarakat tani untuk merebut kembali wilayahnya dengan membentuk kelompok-kelompok separatis juga gagal. Kelompok ini awalnya tidak banyak dihiraukan oleh pemerintah Thailand, namun lama kelamaan kelompok tersebut melawan pemerintah Thailand dan akhirnya menghadapi perlawanan pemerintah (Yuniarto, 2005). Selain itu, kelompok separatis melakukan perlawanan karena pemerintah Thailand menerapkan

kebijakan yang tidak sejalan dengan Islam. Kelompok ini dianggap oleh pemerintah Thailand sebagai kelompok radikal yang tinggal dan bersembunyi di gubuk-gubuk. Akhirnya, banyak toko guru tewas dan gubuk mereka ditutup. Manajemen sistem pendidikan berada di bawah satu atap: kepemimpinan, manajemen, tenaga kependidikan, dan jenis kurikulum, masing-masing dengan dua kelompok yang memiliki dua tujuan untuk siswa yang sama (Nordholt, 2014).

Dalam hal kepemimpinan, masih di bawah naungan ulama Patanii Tujuan pemerintah Thailand adalah mereformasi sektor pendidikan dengan dua model. Salah satunya adalah model cottage yang khas dan yang lainnya adalah model khas Thailand. Pondok yang masih ulet tidak mau mendaftar ke pemerintah Thailand, sehingga pemerintah acuh tak acuh terhadap pondok dan melarang orang Patanii menyekolahkan anaknya ke pondok. Tapi itu tidak semua. Wilayah Pattani sering bentrok dengan pemerintah Thailand dan mempengaruhi kualitas sekolah Pattani (Abdulmani, 2014). Dampak tanda-tanda konflik di sekolah Patanii. Sekolah biasanya mengalami liburan mendadak karena waktu belajar yang lebih pendek, nilai siswa yang buruk, nilai guru yang buruk, dan perubahan konstan dalam sistem politik. Sarana dan prasarana kegiatan yang mendukung keberhasilan pembelajaran juga tidak layak digunakan (Aslan, 2019).

PENUTUP

Situasi Politik Thailand Pada tahun 1930-an, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan. Sistem monton tidak ada lagi. Monthon Pattani dibagi menjadi tiga negara bagian: Pattani, Yarra dan Narathiwat. Setiap Muang (provinsi) menjadi Changwat (provinsi) dan diawasi

langsung oleh pemerintah pusat Bangkok. Kebijakan dan Sistem Pendidikan Islam Thailand; a) Sistem Surau dan Masjid; b) Sistem Pondok Tradisional; c) Sistem Madrasah; d) Sistem Sekolah Taman Didik Kanak-Kanak dan e) Sistem Pondok Pesantren Modern. Dampak Politik terhadap Pembangunan Pendidikan Thailand, manajemen sistem pendidikan berada di bawah satu atap: kepemimpinan, manajemen, tenaga kependidikan, dan jenis kurikulum. Kepemimpinan pendidikan di bawah naungan ulama Patanii Tujuan pemerintah Thailand adalah mereformasi sektor pendidikan dengan dua model.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulmani, L. (2014). Conflict Resolution: a Case Study of the Separatist Movement in the Southern Border Provinces of Thailand. *QIIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 1(1), 1–14.
- Amin, F., & Ananda, R. A. (2019). Kedatangan dan Penyebaran Islam di Asia Tenggara: Telaah Teoritik tentang Proses Islamisasi Nusantara. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 67–100. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3069>
- Aslan, H. &. (2019). Problems in The Thai Patani Malay Islamic Education Problematika Pendidikan Islam Melayu Patani Thailand. *Al-Ulum*, 19(2), 387–401.
- Berutu, A. G. G. (2019). Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Asia. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(2), 230–246. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.230-246>
- Bustamam-Ahmad, K. (2015). Educational practice: Lessons to be learned from madrasah and religious schools in contemporary Southeast

- Asia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 5(1), 29–48. <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.29-48>
- Fathurahman, O. (2014). Transformasi Sistem Pendidikan Islam: Pergulatan Identitas Muslim Melayu-Patani. *Studia Islamika*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/sdi.v8i1.699>
- Harahap, K. S., & Rajab, K. (2022). Analysis of Islamic Educational Policy: *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 06(01), 54–64.
- Karim, P., & Asyari, S. M. (2016). Delivering Islamic Studies And Teaching Diversity In Southern Thai Islamic Schools. *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, 54(1), 123–146. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.54.1.123-146>
- Kusuma, B. M. A. (2016). Masyarakat Muslim Thailand Dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 13(1), 109–120. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/hisbah/article/view/1006>
- Nasrullah Djamil, Khairunnas Rajab, H. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Negara Yang Dilanda Konflik: Studi Kasus Di Pattani Thailand. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 171–187.
- Nordholt, H. S. (2014). Masa-Depan Cerah, Bahaya Menunggu: Negara-Bangsa Baru dan Kekerasan Massal di Asia Tenggara. *Lembaran Sejarah*, 11(2), 109. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23805>
- Ridwan. (2014). Pattani central mosque in Southern Thailand as sanctuary from violence. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 4(2), 213–232. <https://doi.org/10.18326/ijims.v4i2.213-232>
- Sawaluddin, Koiy Sahbudin Harahap, Imran Rido, I. A. S. (2022). The Islamization of Science and Its Consequences: An Examination of Ismail Raji Al-Faruqi 's Ideas Europeans seized the opportunity and attained the golden peak previously held by Islam. 3 realized how backward Islamic Civilization was and aspired to r. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 10(2), 115–128.
- Sodiqin, A. (2016). Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya). *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14(1), 31–50. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.524>
- Yuniarto, P. R. (2005). MINORITAS MUSLIM THAILAND Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 7(1), 89–118. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/213>